

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah Yayah, al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, Jakarta, Qisthi Press, 2005.

Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di indonesia, Jakarta, Cet 1, Sinar Grafika, 2009

Djiwandono Wuryani Esti Sri, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19

Indonesia”, Palembang, Rambang Palembang, 2008.

Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005)

Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Cet 1, Graha Ilmu, 2011.

MK Anshary, “Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial”,

Mudhlor Zuhdi Ahmad dan Ali Atabik, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1999.

Muhammad Syaikh Fiqih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung, Hashim, 2015.

Prints Darwan, “Hukum Anak Indonesia”, Bandung, Cet 1, Citra Aditya Bakti, 2003. Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, “Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Prokoso Djoko I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia,

Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 189.

Ramulyo Idris, Mohd “ Hukum Perkawinan Islam”, Jakarta, Cet 1, Bumi

Aksara, 1996.

Roihan Rasyid Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, Cetakan 15 , Rajawali

Pers 2013

Samawati Putu dan Ernaningsih Wahyu , “Hukum Perkawinan

Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung:

Remaja Rosda Karya).

Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak”, Bandung, Cet 1 , Mandar Maju, 2009.

Yogyakarta, Cet 1, Pustaka Pelajar, 2010.

Z.Tanamas Zulaicha, Joni Muhammad “Aspek Hukum Perlindungan Anak

Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung”, Cet 1, Citra Aditya

Bakti, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 1,(Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

### **C. Jurnal dan lain-lain**

Andika Dewanda Putra Perdana (2017) Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/Pa.Jr). Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

Firman dan Puspytasari Hyma Heppy, 2021, "Perlindungan hukum dalam pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian" , jurnal STKIP PGRI Jombang Volume 5 Nomor 2.

Habibulloh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping", jurnal Menara Ilmu, Vol.XI Jilid 2 No.76.

Sari Putri Eni, 2022, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu", Qiyas Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1

Sepma Armevya, 2020, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi" Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume 1 Nomor 2.

Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*", Yogyakarta, Cet 1, Pustaka Pelajar, 2010.

Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1999.

Darwan Prinst, "Hukum Anak Indonesia", Bandung, Cet 1, Citra Aditya Bakti, 2003. Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, "Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia", Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 189.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Cet 1, Graha Ilmu, 2011

Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam", Jakarta, Cet 1, Bumi Aksara, 1996.

- Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung”, Cet 1, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, Cetakan 15 , Rajawali Pers 2013
- Syaikh Muhammad, Fiqih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung,Hashim, 2015.
- Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “Hukum Perkawinan Indonesia”, Palembang, Rambang Palembang, 2008.
- Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak”, Bandung, Cet 1 , Mandar Maju, 2009.
- Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, Jakarta, Qisthi Press, 2005.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di indonesia, Jakarta, Cet 1, Sinar Grafika , 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

## **C. Jurnal dan lain-lain**

Armevya Sepma, 2020, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi" Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume 1 Nomor 2.

Eni Putri Sari, 2022, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu", Qiyas Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1

Habibulloh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping", jurnal Menara Ilmu,

Vol.XI Jilid 2 No.76.

Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, 2021, “*Perlindungan hukum dalam pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian*” , jurnal STKIP PGRI Jombang Volume 5 Nomor 2.

Perdana Putra Dewanda, Andika (2017) *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/Pa.Jr)*. Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

<https://www.republik.co.id> diakses tanggal 14 mei 2023 Pukul 10.20 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan-hol17429>,

diakses tanggal 14 mei 2023 Pukul 15.00 WIB

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir)

[lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir)

[terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir), diakses tanggal 26 agustus 2023 pukul 12. 00 WIB

[https://ham.go.id/2016/04/18/hak-asasi-manusia-dan-hak-anak-tidak-dapat-](https://ham.go.id/2016/04/18/hak-asasi-manusia-dan-hak-anak-tidak-dapat-dipisahkan/)

[dipisahkan/](https://ham.go.id/2016/04/18/hak-asasi-manusia-dan-hak-anak-tidak-dapat-dipisahkan/) diakses tanggal 22 september 2023 pukul 17.40 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online